

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK YANG BERKUALITAS DI DESA KERTASARI

Oleh:

Nafakhatul Imani, Subiyanto, Tity Kusrina

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pancasakti Tegal

Email Koresponden : imaninafakhatul1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tokoh masyarakat dalam mendorong partisipasi politik yang berkualitas di Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Fokus penelitian mencakup (1) bentuk peran yang dijalankan tokoh masyarakat, (2) strategi komunikasi politik yang digunakan, serta (3) kendala yang dihadapi dalam membangun kesadaran politik warga. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis melalui model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tokoh masyarakat berperan sebagai edukator, mediator, dan panutan moral melalui ruang informal seperti pengajian, musyawarah, dan komunikasi personal. (2) Strategi yang digunakan bersifat persuasif dan kontekstual, memperhatikan latar belakang sosial dan tingkat literasi politik warga. (3) Kendala partisipasi meliputi apatisisme politik, pengaruh transaksional, dan keterbatasan akses informasi. Untuk mengatasinya, tokoh masyarakat menggunakan pendekatan kultural dan keteladanan. Temuan ini menguatkan posisi strategis tokoh masyarakat dalam membentuk partisipasi politik yang bukan sekadar formal, melainkan juga substantif dan reflektif.

Kata Kunci: tokoh masyarakat, partisipasi politik, kesadaran politik, strategi edukasi politik.

Abstract

This study aims to analyze the role of community leaders in promoting quality political participation in Kertasari Village, Suradadi District, Tegal Regency. The research focuses on: (1) the forms of roles carried out by community leaders, (2) the political communication strategies employed, and (3) the challenges faced in building citizens' political awareness. This study adopts a qualitative approach with a descriptive case study design. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, analyzed using the Miles and Huberman model. The findings reveal that: (1) community leaders serve as educators, mediators, and moral role models through informal spaces such as religious gatherings, community meetings, and personal communication; (2) the strategies applied are persuasive and contextual, considering citizens' social backgrounds and levels of political literacy; and (3) participation challenges include political apathy, transactional influences, and limited access to information. To address these issues, community leaders employ cultural approaches and exemplary conduct. These findings reinforce the strategic position of community leaders in fostering political participation that is not merely formal, but also substantive and reflective.

Keywords: *community leaders, political participation, political awareness, political education strategies.*

A. Pendahuluan

Partisipasi politik masyarakat menjadi pilar penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi terutama dalam menjamin hak-hak warga negara untuk turut serta dalam menentukan arah dan kebijakan publik. Dalam sistem politik yang demokratis, legitimasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses kebijakan publik. Sejalan dengan hal tersebut, Parry, Mosley, dan Day (Suparto, 2021) menjelaskan bahwa partisipasi politik diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, pengesahan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun demikian, di banyak wilayah pedesaan, partisipasi politik cenderung bersifat seremonial dan belum didasarkan pada kesadaran kritis terhadap fungsi serta hak politik warga.

Fenomena partisipasi politik yang masih dangkal ini sering kali dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik, budaya politik pasif, serta pengaruh politik transaksional. Budiardjo dalam (Suparto, 2021) menyebut bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi kebijakan publik. Bentuknya dapat berupa pemberian suara, menghadiri rapat umum, berkomunikasi dengan pejabat publik, hingga bergabung dalam organisasi politik. Namun, keterlibatan semacam ini belum tentu mencerminkan pemahaman politik yang mendalam. Hal ini sejalan dengan pendapat Cohen & Uphoff

(Suparto, 2021), yang menekankan bahwa partisipasi politik yang sehat haruslah bersifat sadar, sukarela, dan berbasis pada pemahaman.

Tokoh masyarakat seperti pemuka agama atau pemimpin informal memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial politik. Menurut Soekanto dalam (Tarigan, 2023) peran merupakan dimensi dinamis dari status sosial, yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi yang dimilikinya. Abu Ahmadi dalam (Yare, 2021) menegaskan bahwa peran mencakup harapan bagaimana individu seharusnya bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai fungsi sosial yang diemban. Tokoh masyarakat merupakan individu yang dijadikan panutan dan tempat bertanya oleh masyarakat. Perannya tidak hanya sebagai simbol moral, tetapi juga sebagai penggerak sosial dan penyambung aspirasi antara warga dan pemerintah (Hidayatulloh & Yani, 2021). Konsep ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional Bernard M. Bass dalam (Harsoyo, 2022) yang menekankan peran pemimpin dalam memberi keteladanan, motivasi, stimulasi intelektual, serta perhatian individual kepada komunitasnya.

Desa Kertasari Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal merupakan contoh wilayah yang secara sosial memiliki figur-figur lokal dengan pengaruh kuat, seperti kepala desa, tokoh agama, dan ketua lembaga masyarakat. Menurut (Prasetyo & Irwansyah, 2020) masyarakat merupakan komunitas yang terorganisir dan diikat oleh sistem nilai, norma, serta adat

istiadat sebagai pedoman berperilaku. (Aryani, 2024) menegaskan bahwa masyarakat adalah ruang interaksi yang membentuk kepribadian individu maupun kelompok dengan latar belakang beragam. Sementara itu, (Oktavia, 2020) menambahkan bahwa hubungan sosial dan keteraturan yang jelas dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penting terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis.

Tokoh masyarakat berperan sebagai panutan, sumber rujukan, dan penggerak sosial. tokoh masyarakat sebagai penghubung aspirasi antara warga dan pemerintah (Hidayatulloh & Yani, 2021). Sedangkan (Neliwati et al., 2022) mendefinisikan tokoh masyarakat sebagai pemimpin yang memberikan teladan dan mencerminkan sifat-sifat baik yang layak dicontoh, sehingga tindakan dan ucapannya kerap menjadi acuan warga. (Syabana & Suyono, 2023) juga menambahkan bahwa tokoh masyarakat memiliki kapasitas kepemimpinan yang memengaruhi pola pikir dan tindakan kolektif masyarakat. Meski demikian, tingkat partisipasi politik warga belum sepenuhnya mencerminkan kualitas partisipasi yang ideal. Masih dijumpai sikap apatis, ketergantungan pada imbalan, serta minimnya pemahaman akan nilai demokrasi dan hak-hak politik. Tokoh masyarakat memiliki potensi besar untuk memutus mata rantai pasivitas politik ini melalui pendekatan berbasis budaya dan komunikasi sosial yang akrab dengan keseharian warga.

Partisipasi politik yang berkualitas tidak terlepas dari

pemahaman prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, rakyat memiliki kewenangan penuh menjalankan fungsi kekuasaan negara di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam konteks Demokrasi Pancasila, prinsip tersebut diterapkan melalui partisipasi aktif warga negara, persatuan dalam keberagaman, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. (Rohim et al., 2023). (Hidayah et al., 2022) menegaskan kembali pandangan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nino (2024) mengaitkan prinsip musyawarah dalam Demokrasi Pancasila dengan konsep demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog dan kesepakatan bersama. Sementara itu, Harefa & Hulu (2020) menyoroti peran Demokrasi Pancasila dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa, dengan menuntut toleransi, saling menghormati, serta penerimaan terhadap perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Dalam konteks kemajemukan saat ini, Demokrasi Pancasila menjadi fondasi moral yang menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik yang mengancam persatuan nasional. Pemahaman ini juga menjadi landasan penting bagi tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi politik yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, relevan dengan kebutuhan warga di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan, peran aktor lokal menunjukkan korelasi yang kuat dengan peningkatan partisipasi politik. (Aji, et al., 2024) menyoroti bahwa relawan muda memiliki pengaruh signifikan dalam mobilisasi politik berbasis komunitas. Sementara itu, (Putri, S.W., & Fridayani, 2024) menekankan pentingnya dukungan tokoh masyarakat dalam mendorong partisipasi politik perempuan, meskipun keterlibatan tokoh tersebut di tingkat lokal belum berjalan optimal. (Iriandi et al., 2023) bahkan membuktikan secara statistik bahwa tokoh masyarakat berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Hasil-hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran tokoh masyarakat memiliki dampak nyata terhadap kualitas partisipasi politik, namun aspek strategi komunikasi dan pendekatan berbasis budaya masih jarang digali secara mendalam.

Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek keterlibatan secara kuantitatif atau mobilisasi teknis, tanpa menggambarkan secara mendalam bagaimana peran tokoh masyarakat dijalankan dalam membentuk partisipasi politik yang berkualitas, khususnya dalam momentum politik elektoral seperti Pilkada 2024. Masih terbatas kajian yang menguraikan secara spesifik strategi komunikasi dan pendekatan kultural yang digunakan tokoh masyarakat dalam mengedukasi warga di tingkat desa.

Dengan mempertimbangkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran

tokoh masyarakat dalam membentuk partisipasi politik yang reflektif dan substantif di Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal pada Pilkada 2024. Penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana bentuk peran tokoh masyarakat dalam mendorong partisipasi politik yang berkualitas di Desa Kertasari (2) strategi komunikasi politik apa yang digunakan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran politik warga (3) kendala yang dihadapi tokoh masyarakat dalam mendorong partisipasi politik, dan bagaimana upaya mengatasinya.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian partisipasi politik, dengan menekankan bahwa tokoh masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penyambung aspirasi antara warga dan pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai pendidik politik berbasis nilai-nilai kultural dan komunikasi sosial yang terbukti relevan dan efektif dalam konteks kontestasi politik lokal seperti Pilkada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai partisipasi politik, tetapi juga memberikan dasar praktis bagi perumusan kebijakan pendidikan politik di tingkat desa.

B. Metode Penelitian

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek kajian terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial di Desa Kertasari. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria: 1) dikenal dan diakui masyarakat, 2) aktif dalam kegiatan politik dan sosial desa, 3) bersedia memberikan

informasi secara terbuka. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik, yakni dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Menurut Soekanto dalam (Tarigan, 2023) peran merupakan perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan status sosialnya. Dalam konteks ini, tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial menjalankan perannya dengan menyampaikan pesan politik secara informal dan mengajak warga untuk terlibat aktif dalam proses politik lokal.

Peran tersebut sejalan dengan konsep kepemimpinan transformasional Bernard M. Bass dalam (Harsoyo, 2022) di mana seorang pemimpin transformatif mampu memberikan keteladanan (*Idealized Influence*), menginspirasi (*Inspirational Motivation*), menstimulasi pemikiran kritis (*Intellectual Stimulation*), serta menunjukkan perhatian personal terhadap kebutuhan warga (*Individualized Consideration*). Dalam praktik sosial politik desa, tokoh masyarakat tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi panutan dan pengarah nilai. Hal ini sejalan dengan pendapat

(Kusuma et al., 2022) dimana tokoh adat tidak hanya menjalankan fungsi simbolik, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi dan penjaga harmoni sosial politik lokal.

Partisipasi politik warga di Desa Kertasari menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan keaktifan tokoh masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik desa. Keberadaan tokoh lokal berpengaruh signifikan terhadap pembentukan kesadaran politik warga, baik dalam konteks formal seperti pemilihan umum, maupun melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam keseharian. Proses ini tidak hanya membangun pemahaman terhadap mekanisme demokrasi, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab politik secara kolektif.

Berdasarkan data PPK Kecamatan Suradadi, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Desa Kertasari tercatat sebesar 66%. Namun angka tersebut belum mencerminkan kedalaman kesadaran politik warganya. Sebagian keterlibatan masih didorong oleh tekanan sosial, ajakan pihak tertentu, atau sekadar memenuhi kewajiban formal. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dalam (Suparto, 2021) yang membedakan antara partisipasi otonom dan partisipasi eksternal. Partisipasi otonom mencerminkan kualitas demokrasi yang matang, sedangkan partisipasi eksternal cenderung bersifat pasif dan tidak reflektif. Hal tersebut menjadi tantangan utama tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi atau pemahaman politik kepada warga.

Dalam forum musyawarah dan kegiatan sosialisasi, tokoh masyarakat memainkan fungsi sebagai jembatan komunikasi antara agenda kebijakan dan kebutuhan warga. Surbakti dalam (Irliandi et al., 2023) menyebut bahwa tokoh masyarakat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga serta sebagai pemersatu kepentingan kolektif. Peran ini memperkuat ruang partisipatif di tingkat desa dan mendorong lahirnya kesadaran politik yang lebih substantif. Dengan demikian, tokoh masyarakat di Desa Kertasari menjalankan peran strategis dalam membentuk partisipasi politik yang lebih sadar, reflektif, dan bertanggung jawab. Peran tersebut tidak hanya berdampak pada tingkat kehadiran dalam pilkada, tetapi juga dalam membangun pemahaman jangka panjang terhadap nilai demokrasi dan kewarganegaraan aktif.

Strategi Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Strategi komunikasi politik yang diterapkan menunjukkan pendekatan yang beragam, menyesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan latar belakang warga. Peran tokoh masyarakat dalam konteks ini tidak terbatas pada fungsi simbolik atau formal, melainkan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari melalui penyampaian nilai-nilai politik secara kontekstual. Nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui kedekatan sosial yang terbangun dalam forum keagamaan, kegiatan perempuan, hingga musyawarah desa. Sejalan dengan (Kusrina, 2020) yang menyatakan bahwa

munculnya figur-figur yang menjadi panutan dalam lingkungan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan serta organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari penguatan karakter sosial warga. Dalam konteks politik lokal, tokoh masyarakat juga memainkan peran sebagai rujukan moral dan pengarah perilaku politik masyarakat.

Forum sosial seperti pengajian, jam'iyah digunakan sebagai ruang penyampaian pesan politik secara santai dan dialogis. Komunikasi dalam forum tersebut tidak diarahkan untuk memengaruhi pilihan politik tertentu, melainkan bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya hak pilih dan peran warga dalam proses demokrasi. Sebagaimana disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat: "*Dalam kegiatan keagamaan, baik majelis taklim maupun dalam acara jam'iyah diselipkan pesan pentingnya partisipasi dalam pemilihan*" (Tokoh Masyarakat, 2025). Pernyataan ini juga diperkuat oleh warga : "*Biasanya disampaikan di pengajian, masjid, tokoh masyarakat juga memberi pesan memilih pemimpin yang amanah*". (Warga, 2025).

Strategi ini merefleksikan prinsip *idealized influence* dalam teori kepemimpinan transformasional Bernard M. Bass dalam (Harsoyo, 2022), di mana tokoh masyarakat menjalankan perannya sebagai pembawa nilai sekaligus panutan moral. Lebih lanjut, (Sugara et al., 2024) menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran krusial dalam mengubah nilai-nilai demokrasi dan

meningkatkan kesadaran politik di kalangan warganya masing-masing.

Selain memanfaatkan ruang kolektif, pendekatan juga dikembangkan dalam bentuk musyawarah desa dan forum warga. Pada momen tersebut, materi yang disampaikan mencakup informasi teknis tahapan pemilihan serta urgensi peran warga dalam menentukan arah kebijakan. Melalui pola komunikasi ini, terjadi proses edukasi yang tidak hanya menambah pengetahuan praktis, tetapi juga menumbuhkan *intellectual stimulation*, yaitu dorongan untuk berpikir kritis dan memahami politik sebagai bagian dari kehidupan warga negara yang bertanggung jawab. Strategi komunikasi politik juga diterapkan secara personal. Beberapa tokoh menggunakan pendekatan langsung seperti kunjungan rumah atau pemanfaatan media sosial sebagai saluran penyampaian pesan. “Cara pertama dengan mendatangi langsung kepada warga, mengenalkan kepada masyarakat bagaimana cara mencoblos, door to door juga dilakukan karena sangat strategis” (Tokoh Masyarakat, 2025).

Pendekatan ini dinilai efektif untuk menjangkau kelompok yang kurang aktif dalam forum umum, termasuk pemilih pemula dan warga usia lanjut. Strategi ini mencerminkan dimensi *individualized consideration*, yakni kesadaran untuk menyesuaikan pola komunikasi dengan kebutuhan, usia, tingkat pendidikan, serta tingkat literasi politik dari masing-masing individu. Sejalan dengan pandangan Soekanto dalam

(Tarigan, 2023), peran dijalankan sebagai manifestasi dinamis dari status sosial, dan mencakup perilaku yang diharapkan sesuai posisi dalam struktur sosial.

Ruang-ruang informal seperti pertemuan warga dan komunitas pemuda juga dimanfaatkan sebagai media diskusi politik terbuka. Strategi ini memungkinkan penyampaian pendapat secara bebas tanpa tekanan, sehingga memperkuat semangat partisipatif dalam pengambilan keputusan. Makna partisipasi dalam konteks tersebut sesuai dengan pandangan The Liang Gie dalam (Sijaya & Umuri, 2023) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan sadar dalam proses kolektif, termasuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan bersama. Pendekatan yang diterapkan tidak semata diarahkan pada peningkatan partisipasi secara kuantitatif, melainkan ditujukan untuk membangun partisipasi politik yang berkualitas. Proses komunikasi difokuskan pada penguatan pemahaman tentang apa yang dipilih dan alasan rasional di balik pilihan tersebut. Pandangan Dafis dalam (Suparto, 2021) menyatakan bahwa partisipasi mencakup bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga pemikiran, perasaan, dan keterlibatan emosional dalam proses pengambilan keputusan. Pola-pola komunikasi politik yang dikembangkan di Desa Kertasari menunjukkan kecenderungan ke arah partisipasi karena dilakukan secara sukarela, sadar, dan rasional.

Dengan pendekatan berbasis nilai, penggunaan ruang sosial yang familiar, serta komunikasi yang adaptif terhadap latar belakang audiens, strategi penyampaian politik di Desa Kertasari menampilkan bentuk intervensi sosial yang efektif. Praktik ini menunjukkan bahwa upaya membangun kesadaran politik tidak dapat dilakukan secara seragam dan formalistik, melainkan melalui interaksi sosial yang membumi, fleksibel, dan memperhatikan kebutuhan warga secara kontekstual.

Kendala yang dihadapi dalam Membangun Partisipasi Politik dan Cara Mengatasinya

Kesadaran politik ini menurut (Jones, 2020) terbentuk ketika warga negara bersedia menerima dan memahami situasi serta dinamika elit partai politik di negara mereka. Peningkatan kesadaran politik di Desa Kertasari menunjukkan tren positif, terutama setelah adanya peran aktif tokoh masyarakat dalam menyampaikan pendidikan politik. Indikator perubahan tercermin dari meningkatnya kecenderungan warga untuk menentukan pilihan secara rasional dan mandiri. Ruang diskusi politik mulai dimanfaatkan oleh kelompok muda, mencerminkan geliat partisipasi yang lebih terbuka. Namun demikian, kemajuan tersebut tidak terjadi secara merata karena sejumlah hambatan masih menghambat efektivitas pembentukan kesadaran politik.

Salah satu tantangan utama berasal dari kekecewaan terhadap realitas politik. Janji kampanye yang tidak terealisasi menimbulkan sikap

apatis dan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. *“Kadang-kadang juga merasa kecewa, sebelum terpilih memberikan janji-janji, namun setelah terpilih tidak ditepati. Itulah yang membuat masyarakat merasa terbodohi”* (Tokoh Masyarakat, 2025). Persepsi bahwa partisipasi hanya menguntungkan kelompok tertentu turut memperlemah motivasi warga untuk terlibat. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi tidak tumbuh dari pemahaman yang utuh, tetapi lebih didorong oleh tekanan atau harapan imbalan. Huntington dan Nelson dalam (Suparto, 2021) menyatakan bahwa partisipasi yang bersifat eksternal memiliki karakteristik rapuh karena tidak dilandasi kesadaran kritis.

Pendekatan edukatif menjadi salah satu solusi penting. Tokoh masyarakat menekankan perlunya menyampaikan pesan secara sabar dan konsisten. Selain itu, nilai moral dan keagamaan juga dijadikan dasar dalam membangun kembali kepercayaan warga. *“Tokoh masyarakat mengajarkan bahwa yang namanya hidup berdemokrasi memang harus menerima apa yang dipilih dan yang sah menurut undang-undang. Yang sudah terpilih harus diakui sebagai kepala negara, kepala daerah atau yang lain. Kemudian masyarakat diberi wawasan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman, mencintai pemimpin dan negara itu ibadah.”* (Tokoh Masyarakat, 2025).

Kendala juga muncul dari aspek sosial dan demografis, khususnya pada kelompok lanjut usia. Hambatan dalam menerima informasi politik

sering disebabkan oleh keterbatasan daya tangkap dan metode penyampaian yang kurang adaptif. Untuk menjawabnya, strategi dilakukan melalui simulasi dan penyesuaian tempo komunikasi. *“Biasanya ditunjukkan langsung cara mencoblos yang benar, karena kalau hanya ceramah tidak semua paham”* (Tokoh Masyarakat 2025). Pendekatan ini menunjukkan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan audiens, sejalan dengan pandangan Soekanto dalam (Tarigan, 2023) bahwa peran sosial bersifat dinamis dan berjalan seiring dengan tuntutan lingkungan.

Tantangan lain bersifat teknis, misalnya keterbatasan akses informasi yang dialami warga lansia, penyandang disabilitas, atau penduduk perantau. Untuk menjangkau kelompok tersebut, disusun strategi alternatif seperti penyuluhan dari rumah ke rumah, pemanfaatan media digital bagi kelompok muda, serta penyebaran informasi melalui masjid dan forum keagamaan. Selain itu, perbedaan pilihan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial juga direspons melalui penanaman nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. *“Perbedaan itu sifatnya sementara... di luar itu semua tetap saudara. Beda pandangan dan pendapat juga dilindungi oleh undang-undang”* (Tokoh Masyarakat 2025).

Selain itu, masih ditemukan sikap pragmatis yang menganggap keikutsertaan dalam kegiatan politik sebagai sarana untuk memperoleh imbalan materi. Pemahaman semacam ini bertentangan dengan

prinsip demokrasi yang menjunjung keadilan dan partisipasi sukarela. Dalam menghadapi pandangan tersebut, pendekatan yang ditempuh meliputi penanaman nilai etis, kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab politik, serta ajakan untuk berpartisipasi secara jujur dan mandiri. Upaya ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut (Irliandi et al., 2023) yang diarahkan untuk membentuk individu yang kritis, bertanggung jawab, dan partisipatif dalam kehidupan politik. Secara umum, hambatan dalam membangun partisipasi politik tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan nilai. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak dapat diseragamkan. Penyampaian pesan politik perlu memperhatikan kondisi sosial, kesiapan emosional, serta konstruksi berpikir masyarakat. Strategi yang mengedepankan pendekatan humanis dan komunikatif berpeluang lebih besar dalam mendorong partisipasi politik yang sadar, mendalam, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga, penelitian ini menemukan beberapa tema utama yang berkaitan dengan peran tokoh masyarakat, strategi komunikasi, hambatan serta upaya dalam mendorong partisipasi politik. Untuk memberikan gambaran ringkas, tabel 1 menyajikan sebagian temuan kunci dengan kutipan dan analisis teoritis yang mendukung interpretasi penelitian.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek	Temuan Utama	Contoh Data/Kutipan	Teori
Peran Tokoh Masyarakat	Tokoh masyarakat berperan sebagai edukator, mediator, panutan moral, dan penghubung apirasi warga dengan pemerintah.	<i>“Dalam kegiatan keagamaan, baik majelis taklim maupun dalam acara jam’iyah diselipkan pesan pentingnya partisipasi dalam pemilihan” (Tokoh Masyarakat, 2025). Pernyataan ini juga diperkuat oleh warga : “Biasanya disampaikan di pengajian, masjid, tokoh masyarakat juga memberi pesan memilih pemimpin yang amanah”. (Warga, 2025)</i>	Sejalan dengan Bass (Harsoyo, 2022) bahwa kepemimpinan transformasional mampu mempengaruhi kesadaran politik melalui keteladanan dan motivasi.
Strategi Komunikasi	Menggunakan pendekatan persuasif, kultural, dan kontekstual, melalui forum keagamaan, musyawarah, door to door, dan media sosial.	<i>“Cara pertama dengan mendatangi langsung kepada warga, mengenalkan kepada masyarakat bagaimana cara mencoblos, door to door juga dilakukan karena sangat strategis” (Tokoh Masyarakat, 2025)</i>	Mendukung konsep Bass (Harsoyo, 2022) yang mencerminkan dimensi individualized consideration serta Soekanto (Tarigan, 2023) Peran sosial bersifat dinamis
Kendala	Apatisme politik, politik transaksional, keterbatasan informasi, kekecewaan pada janji politik.	<i>“Kadang-kadang juga merasa kecewa,sebelum terpilih memberikan janji-janji, namun setelah terpilih tidak ditepati. Itulah yang membuat masyarakat merasa terbodohi” (Tokoh Masyarakat, 2025)</i>	Huntington & Nelson (Suparto, 2021) – Partisipasi yang bersifat eksternal memiliki karakteristik yang rapuh.
Solusi	Edukasi berbasis nilai agama, pendekatan personal, simulasi untuk lansia, penanaman nilai toleransi.	<i>“Tokoh masyarakat mengajarkan bahwa yang namanya hidup berdemokrasi memang harus menerima apa yang dipilih dan yang sah menurut undang-undang. Yang sudah terpilih harus diakui sebagai kepala negara, kepala daerah atau yang lain. Kemudian masyarakat diberi wawasan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman, mencintai pemimpin dan negara itu ibadah.” (Tokoh Masyarakat, 2025)</i>	Soekanto (Tarigan, 2023) – Peran sosial bersifat dinamis

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Partisipasi politik masyarakat di Desa Kertasari tidak hanya terbentuk oleh momentum elektoral, melainkan berkembang melalui proses sosial yang berlangsung secara kontinu. Peran tokoh masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendorong keterlibatan politik warga, tidak hanya melalui kehadiran dalam kegiatan pemilihan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui edukasi, dialog, dan keteladanan.

Strategi yang diterapkan tidak bersifat seragam, melainkan menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik kelompok warga. Forum keagamaan, musyawarah desa, media sosial, hingga kunjungan langsung ke rumah warga dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi yang efektif dan kontekstual. Pendekatan ini mencerminkan kepekaan terhadap keberagaman audiens dan menunjukkan pemahaman bahwa partisipasi politik tidak dapat dibangun secara instan, tetapi melalui proses pembelajaran yang bersifat dialogis dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, partisipasi politik masih menghadapi hambatan yang bersumber dari kekecewaan terhadap realitas politik, sikap apatis, hingga keterbatasan akses dan kapasitas fisik pada kelompok tertentu. Upaya untuk menjawab tantangan dilakukan melalui pendekatan yang humanis, sabar, dan adaptif, yang mengedepankan nilai toleransi, tanggung jawab bersama, dan pendidikan politik berbasis komunitas.

Dengan demikian, partisipasi politik di Desa Kertasari

menunjukkan kecenderungan tumbuh secara bertahap menuju arah yang lebih substantif. Peran tokoh masyarakat dalam proses ini menjadi katalisator penting bagi pembentukan kesadaran politik warga, yang tidak hanya terukur secara kuantitatif, tetapi juga ditandai oleh munculnya sikap kritis, rasa tanggung jawab, dan keberanian untuk terlibat dalam pengambilan keputusan bersama.

Penelitian ini memberikan kontribusi nyata baik pada tataran kebijakan maupun pengembangan teori. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa untuk merancang program pendidikan politik berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai fasilitator utama, sehingga partisipasi tidak hanya bersifat formal, tetapi substantif dan reflektif. Secara teoretis, memperkuat konsep partisipasi politik (Budiardjo, Huntington & Nelson) dengan menekankan bahwa kualitas partisipasi warga sangat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan transformasional (Bass), yang menjalankan fungsi edukatif, komunikatif, dan kultural secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur partisipasi politik dengan menegaskan pentingnya dimensi sosial kultural di tingkat desa.

Rekomendasi/Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperkuat partisipasi politik yang berkualitas di tingkat desa:

1. Bagi Tokoh Masyarakat: Perlu mengintensifkan peran dalam pendidikan politik melalui forum keagamaan, kegiatan

- sosial, dan media digital guna menjangkau kelompok muda. Pendekatan komunikatif terhadap kelompok rentan, seperti warga lanjut usia dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, disarankan dilakukan secara sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami.
2. Bagi Pemerintah Desa : Perlu meningkatkan kolaborasi bersama tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi politik. Peran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai fasilitator literasi politik guna membangun kesadaran kolektif warga.
 3. Bagi Masyarakat: Partisipasi politik sebaiknya dipahami tidak sebatas kehadiran dalam pemilu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sipil. Upaya aktif dalam mengakses informasi, mengikuti forum musyawarah desa, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal perlu terus ditingkatkan sebagai wujud demokrasi partisipatif.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Aji, A.N.S, Fitriyah, L. K. A. (2024). Partisipasi Politik Relawan Orang Muda Ganjar Jawa Tengah Dalam Menyongsong Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024 Di Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 570–584.
- Aryani, I. K. (2024). Memahami Konsep Masyarakat Sebagai Lingkungan Sosial. *Jurnal Prymary*, 2(4), 251–257.
- Harsoyo, R. (2022). Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M. Bass dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 247–262.
- <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i2.112>
- Hidayah, Y., Ulfa, N., & Belladonna, P. (2022). September 2022 2022| Revised: 26. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 1(2), 110–123.
- Hidayatulloh, M. F., & Yani, M. T. (2021). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(3), 540–554. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p540-554>
- Irliandi, I. A., Normansyah, A. D., & Sukarlina, L. (2023). Pengaruh Tokoh Masyarakat terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(10), 333–339. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i10.1721>
- Jones, P. E. (2020). Partisanship, Political Awareness, and Retrospective Evaluations, 1956–2016. *Political Behavior*, 42(4), 1295–1317. <https://doi.org/10.1007/s11109-019-09543-y>
- Kusrina, T. (2020). Peran Masyarakat Menanam Pendidikan Karakter Secara Madiri. *Jurnal Profesi Pendidik*, 7(1), 24–36.
- Kusuma, W. J., Subiyanto, Samidi, & Asrawijaya, E. (2022). Modal Sosial Masyarakat Jalawastu Dalam Membangun Integrasi Sosial Dengan Pemerintah Daerah. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(2), 79–86. <https://doi.org/10.24076/jspg.v4i2.876>
- Neliwati, N., Rizal, S., & Hemawati, H. (2022). Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 32–43. <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v9i1.6233>
- Oktavia, R. (2020). *Interaksi Sosial Masyarakat Desa dan Kota*.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen*

- Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175.
<https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Putri, S.W., & Fridayani, Y. . (2024). Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Kendal Pasca Pemilu 2024. *Jurnal Sosial Politik*, 7(1), 13–20.
<https://doi.org/10.32699/resolusi.v7i1.7531>
- Rohim, M., Rahmawati, L., Raihan, A., & Rizki, S. (2023). Demokrasi Pancasila: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 664.
- Sijaya, E., & Umuri, H. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. *Journal Law and Justice*, 1(2), 45–59.
<https://jurnalilmiah.co.id/index.php/MJPJLJ/article/view/25>
- Sugara, H., Mutmainah, F., & Safitri, D. (2024). Pendidikan Politik Lintas Generasi Dalam Membangun Partisipasi Politik Menghadapi Sukses Tahun Politik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(Jati 2021), 118–128.
- Suparto, D. (2021). *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat* (Sixteen (ed.); 2nd, juli 20 ed.). CV Cendekia Press.
- Syabana, M. S. A., & Suyono, S. (2023). Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat dalam Menghadapi Pemilu 2024 (Studi Kasus pada Tokoh Pemuka Pendapat Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember). *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 1(1), 9.
<https://doi.org/10.47134/jbkd.v1i1.1909>
- Tarigan, B. (2023). *Sripsi Oleh : Melyana BR Tarigan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area*.
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2), 17–28.